

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk menilai sejauh mana tujuan, sasaran, serta rencana kegiatan telah tercapai. Evaluasi tidak hanya berorientasi pada hasil akhir dari suatu program atau kegiatan, tetapi juga mencakup penilaian terhadap proses pelaksanaannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai efektivitas, efisiensi, dan relevansi program yang dijalankan. Dengan demikian, evaluasi menjadi alat penting dalam memberikan umpan balik yang konstruktif bagi pengambilan keputusan di masa yang akan datang, baik untuk perbaikan kebijakan, peningkatan kinerja, maupun penyesuaian terhadap kebutuhan dan kondisi yang berkembang. Evaluasi juga berperan sebagai sarana untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, terutama dalam konteks pelayanan publik atau pelaksanaan kebijakan pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian Sufi (2020), yang menyatakan bahwa evaluasi program diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan serta mengukur tingkat keberhasilan suatu program.

Melakukan evaluasi terhadap kebijakan publik sangat penting karena dapat menggambarkan tingkat keberhasilan dan efisiensi pelaksanaan program pemerintah. Selain itu, evaluasi membantu memastikan bahwa sumber daya yang digunakan benar-benar memberikan dampak positif sesuai dengan yang direncanakan bagi masyarakat. Proses ini juga berperan dalam meningkatkan mutu kebijakan publik secara keseluruhan. Secara umum, evaluasi berfungsi

untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil menjaga akuntabilitas kepada masyarakat, mencapai target yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi perbedaan antara ekspektasi dan realisasi di lapangan.

Kebijakan yang dibuat juga harus dengan yang dibutuhkan masyarakat seperti halnya dalam kebijakan menanggulangi pengangguran. Tingkat pengangguran yang masih tinggi merupakan tantangan serius bagi pembangunan daerah, terutama dalam menciptakan masyarakat yang produktif dan mandiri. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini adalah melalui pelaksanaan program pelatihan tenaga kerja yang ditujukan bagi pencari kerja, khususnya yang belum memiliki keterampilan memadai. Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan kerja, memperluas akses terhadap lapangan kerja, serta menekan angka pengangguran secara signifikan.

Dalam hal pelatihan tenaga kerja, di kota Lhokseumawe telah diatur dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan berkualitas serta mewujudkan pemerataan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Bukan hanya ditingkat nasional namun permasalahan pengangguran juga terjadi di Kota Lhokseumawe. Ditingkat Provinsi Aceh, Kota Lhokseumawe merupakan kota yang memiliki pengangguran tertinggi di Provinsi Aceh. Kepala BPS Kota Lhokseumawe, mengatakan bahwa penyebab kota Lhokseumawe menjadi daerah dengan pengangguran tertinggi di aceh adalah karena “Kota Lhokseumawe merupakan pusat pertumbuhan di antara kabupaten ataupun kota yang berada di sekitarnya, sehingga banyak terdapat pelajar ataupun pendatang dari luar daerah yang

menjadikannya sebagai kota tujuan untuk mencari kerja” Oriza (2022). Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut kab/kota di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kab/Kota
2022-2024

KABUPATEN/KOTA & PROVINSI	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) MENURUT KABUPATEN/KOTA (PERSEN)		
	2022	2023	2024
SIMEULUE	6	5.85	5.5
ACEH SINGKIL	6.88	6.84	6.44
ACEH SELATAN	4.82	4.73	4.56
ACEH TENGGARA	5.09	5	4.79
ACEH TIMUR	8.07	8.03	7.75
ACEH TENGAH	4.44	4.42	4.21
ACEH BARAT	6.09	6.07	5.58
ACEH BESAR	8.28	8.17	7.93
PIDIE	5.94	5.92	5.74
BIREUEN	4.2	4.14	3.93
ACEH UTARA	7.08	7.07	6.88
ACEH BARAT DAYA	4.12	4.08	3.83
GAYO LUES	2.7	2.65	2.4
ACEH TAMIANG	7.38	7.21	6.95
NAGAN RAYA	5.84	5.74	5.22
ACEH JAYA	3.12	2.88	2.75
BENER MERIAH	2.61	2.45	2.2
PIDIE JAYA	4.4	4.34	3.82
BANDA ACEH	8.62	8.03	7.55
SABANG	4.01	3.92	2.95
LANGSA	7.85	7.73	7.34
LHOKSEUMAWE	9.15	8.78	8.47
SUBULUSSALAM	5.75	5.69	5.12
PROVINSI ACEH	6.17	6.03	5.75

Sumber : BPS, 2024

Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh menunjukkan tren penurunan dari tahun 2022 hingga 2024, di mana TPT provinsi turun dari 6,17% menjadi 5,75%. Namun, Kota Lhokseumawe secara konsisten mencatat angka TPT tertinggi di Aceh selama tiga tahun berturut-turut, yakni

9,15% pada 2022, 8,78% pada 2023, dan 8,47% pada 2024. Meskipun mengalami penurunan, angka ini masih jauh di atas rata-rata provinsi, yang menunjukkan bahwa Lhokseumawe menghadapi tantangan serius dalam hal penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini mengindikasikan perlunya upaya strategis dan berkelanjutan dalam mengatasi pengangguran, seperti peningkatan kualitas calon pencari kerja.

Permasalahan pengangguran di Kota Lhokseumawe saat ini menunjukkan kecenderungan yang cukup mengkhawatirkan, karena dominasi pengangguran oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Lulusan SMA menempati persentase tertinggi dalam struktur pengangguran terbuka di kota Lhokseumawe. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara latar belakang pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Berikut pengangguran di kota Lhokseumawe berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 1. 2
Jumlah Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan
Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Jumlah Pengangguran
Belum menamatkan Sekolah Dasar (SD)	166 Jiwa
Lulusan Sekolah Dasar (SD)	959 Jiwa
Lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	740 Jiwa
Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA)	3.012 Jiwa
Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	915 Jiwa
Lulusan Diploma I-III	141 Jiwa
Lulusan Universitas (Diploma IV, S1, S2 dan S3)	2.078 Jiwa
Jumlah	8.011 Jiwa

Sumber : *regional.kompas.com*,2025

Data pengangguran di Kota Lhokseumawe menunjukkan bahwa lulusan SMA merupakan kelompok dengan jumlah pengangguran tertinggi, yaitu 3.012 jiwa, disusul oleh lulusan perguruan tinggi sebanyak 2.078 jiwa. Hal ini mencerminkan bahwa pendidikan menengah dan tinggi belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pasar kerja. Sebaliknya, lulusan seperti SMK dan Diploma I–III memiliki angka pengangguran yang lebih rendah, yang mengindikasikan bahwa keterampilan praktis lebih dibutuhkan di dunia kerja lokal. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan pelatihan kerja dan pendidikan berbasis keterampilan agar penyerapan tenaga kerja lebih optimal. Tingkat Pengangguran yang tinggi menunjukkan bahwa banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Berikut merupakan komposisi penduduk kota Lhokseumawe pada tahun 2020 – 2024 :

Tabel 1. 3
Komposisi penduduk dan ketenagakerjaan Kota Lhokseumawe
Tahun 2020-2024

Komposisi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk	188.713	210.177	191.396	196.067	198.705
Penduduk usia kerja 15+	136.977	151.529	139.959	145.422	147.685
Penduduk usia kerja (15-64)	129.989	143.458	131.728	133.192	135.676
Bukan angkatan kerja	54.784	54.694	59.668	62.875	52.460
Angkatan kerja	93.958	96.835	98.953	93.594	95.783
1. Bekerja	82.696	86.031	89.894	85.373	87.672
2. Pengangguran	11.262	10.804	9.059	8.221	8.011
Tingkat Partisipasi AK	68,59%	63,91%	70,70%	64,36%	64,86%
Tingkat Pengangguran Terbuka	11,99%	11,16%	9,155	8,78%	8,47%

Sumber: *DPMPTSP Dan Tenaga Kerja Kota Lhoksumawe tahun 2025*

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun sempat menurun pada tahun 2023.

Kenaikan jumlah angkatan kerja ini secara tidak langsung meningkatkan persaingan dalam mendapatkan pekerjaan. Di sisi lain, jumlah pengangguran terus mengalami penurunan setiap tahun, meskipun angkanya masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun semakin banyak penduduk yang masuk ke pasar kerja, belum semua dapat terserap dengan baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya turut memengaruhi tingkat pengangguran yang terjadi di Kota Lhokseumawe yang bisa bekerja.

Dikarenakan tingginya pengangguran di kota Lhokseumawe tersebut Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe sebagai pilar utama dalam mengurus ketenagakerjaan di kota Lhokseumawe melakukan sebuah Program Pelatihan Tenaga Kerja dan menggandeng Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (Lpks) untuk penyelenggaraan program tersebut. Program pelatihan tenaga kerja sendiri merupakan sebuah program yang diusulkan dari pemerintah pusat untuk dilaksanakan di setiap daerah Indonesia. Dengan demikian program pelatihan tenaga kerja memang sewajibnya dilaksanakan di setiap tak terkecuali di Kota Lhokseumawe.

Pelaksanaan program pelatihan tenaga kerja di kota lhokseumawe ini melibatkan pihak swasta yaitu Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (Lpks) sebagai instruktur dalam pemberian materi pelatihan. Berbeda dengan daerah lain yang program pelatihan tenaga kerja nya di laksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (Uptd Blk) yang bertugas untuk menyediakan berbagai program keterampilan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Hal ini terjadi karena di kota Lhokseumawe sendiri belum memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (Uptd Blk) sehingga Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe harus menggandeng Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (Lpks) untuk melaksanakan program pelatihan tenaga kerja.

Program pelatihan tenaga kerja di Lhokseumawe dilaksanakan berdasarkan anggaran yang tersedia yang dengan kata lain untuk setiap tahun nya jumlah program pelatihan yang diadakan tidak menentu dan kuota peserta pelatihan juga terkadang mengikuti anggaran yang telah disediakan. Berikut daftar program pelatihan tenaga kerja di Lhokseumawe dalam tahun 2023 – 2024.

Tabel 1. 4
Daftar Program Pelatihan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe
Tahun 2023-2024

No	Tahun	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Lokasi
1	2023	Pelatihan Service Sepeda Motor Matic	16	05/06/2023	22/06/2023	Lhokseumawe
2	2023	Pelatihan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	20	24/07/2023	01/08/2023	Lhokseumawe
3	2023	Pelatihan Desain Grafis Dan Digital Printing	20	24/10/2023	31/10/2023	Lhokseumawe
4	2023	Pelatihan Teknisi System Pembacaan Dan Aplikasi Alat-Alat Ukur Di Industri	15	27/11/2023	02/12/2023	Lhokseumawe
5	2023	Pelatihan Basic Office	32	05/12/2023	13/12/2023	Lhokseumawe
6	2024	Pelatihan Juru Ikat Beban	10	08/01/2024	26/01/2024	Cepu
7	2024	Pelatihan Tata Rias	20	20/02/2024	28/02/2024	Lhokseumawe
8	2024	Pelatihan Las Listrik	20	20/02/2024	28/02/2024	Lhokseumawe
9	2024	Pelatihan Teknisi Handphone	30	22/10/2024	22/11/2024	Lhokseumawe

Sumber: *DPMPTSP Dan Tenaga Kerja Kota Lhoksumawe tahun 2025*

Berdasarkan tabel pelaksanaan program pelatihan tenaga kerja di Kota Lhokseumawe tahun 2023–2024, terlihat bahwa pemerintah daerah melalui LPKS telah menyelenggarakan berbagai jenis pelatihan berbasis kompetensi, seperti pelatihan otomotif, administrasi perkantoran, desain grafis, tata rias, listrik, hingga teknisi handphone. Total terdapat sembilan program pelatihan dengan jumlah peserta bervariasi, mulai dari 10 hingga 32 orang per angkatan, yang menunjukkan pendekatan pelatihan berskala kecil. Jumlah peserta yang ikut dalam pelatihan tersebut bisa dikatakan masih sedikit dari jumlah seluruh angka pengangguran yang ada di kota Lhokseumawe.

Salah satu penyebab minimnya peserta program pelatihan tersebut dikarenakan pemberitahuan atau sosialisasi dari program pelatihan itu tersebut hanya dengan menempelkan poster/spanduk dipapan pemberitahuan didepan kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe serta di media sosial. Selain itu minat masyarakat yang minim disebabkan karena masyarakat hanya mengharapkan uang saku dari program pelatihan tersebut. Jadi jika pelatihan tersebut tidak memberikan uang saku maka masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam program tersebut.

Permasalahan yang lain terjadi adalah dalam program pelatihan ini adalah Balai latihan kerja (Blk) yang belum tersedia di kota lhokseumawe juga menjadi tantangan karena harus mencari lagi Lembaga pelatihan kerja swasta yang berkompeten sehingga ilmu yang didapatkan bisa dipakai setelah dari pelatihan tersebut. Selain faktor pelaksanaan, persoalan anggaran juga menjadi tantangan penting dalam keberlanjutan program pelatihan tenaga kerja. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah terbatasnya alokasi dana untuk pengadaan peralatan

pascapelatihan. Akibatnya, meskipun peserta telah memperoleh keterampilan selama pelatihan, mereka kesulitan untuk mengaplikasikan atau mengembangkan keahlian yang diperoleh karena tidak memiliki akses terhadap peralatan yang memadai. Kondisi ini menyebabkan ilmu dan keterampilan yang telah diberikan tidak dimanfaatkan secara optimal, sehingga tujuan utama dari program pelatihan—yakni peningkatan kemandirian dan penyerapan tenaga kerja—tidak tercapai secara maksimal.

Berdasarkan fenomena fenomena tersebut maka peneliti memiliki ketertarikan dalam meneliti dengan judul “Evaluasi program pelatihan tenaga kerja oleh lembaga pelatihan kerja swasta (lpks) dalam menanggulangi pengangguran di kota lhokseumawe”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana evaluasi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja terhadap Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) ?
2. Apa saja hambatan dalam Program pelatihan tenaga kerja di Kota Lhokseumawe ?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka peneliti memfokuskan penelitian ini sebagai berikut:

1. Evaluasi program pelatihan tenaga kerja oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja terhadap Lembaga

Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang di fokuskan pada aspek *Input* (Persiapan dan sumber daya), *Process* (Pelaksanaan), *Output* (hasil langsung), dan *Outcome* (Hasil jangka panjang)

2. Hambatan dalam melaksanakan program pelatihan tenaga kerja oleh lembaga pelatihan kerja swasta (lpks) dalam menanggulangi pengangguran di kota lhokseumawe

1.4 Tujuan Penelitian

Berikut ini tujuan yang ingin dicapai pada penelitian:

1. Untuk Evaluasi program pelatihan tenaga kerja oleh lembaga pelatihan kerja swasta (lpks) dalam menanggulangi pengangguran di kota lhokseumawe yang di fokuskan pada aspek *Input* (Persiapan dan sumber daya), *Process* (Pelaksanaan), *Output* (hasil langsung), dan *Outcome* (Hasil jangka panjang)
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kendala dalam melaksanakan program pelatihan tenaga kerja oleh lembaga pelatihan kerja swasta (lpks) dalam menanggulangi pengangguran di kota lhokseumawe

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai pendorong pertumbuhan intelektual peneliti.
 - b. Mengaplikasikan apa yang telah dipelajari selama perkuliahan serta membandingkannya dengan kondisi dan praktik yang terjadi di sosial masyarakat secara langsung

- c. Untuk mengevaluasi melaksanakan program pelatihan tenaga kerja oleh lembaga pelatihan kerja swasta (lpks) dalam menanggulangi pengangguran di kota lhokseumawe
- d. Sebagai referensi dan informasi ilmiah yang bisa digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian dikemudian hari.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penulisan ini sebagai pemenuhan syarat guna meraih gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- b. Bagi masyarakat, penulisan ini dapat menjadi bahan masukan dan informasi terkait program pelatihan tenaga kerja oleh lembaga pelatihan kerja swasta (lpks) di kota lhokseumawe
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan perbaikan program dalam keberlanjutan pelaksanaa terkait program pelatihan tenaga kerja oleh lembaga pelatihan kerja swasta (lpks) di kota lhokseumawe